

ISSN 1979-5394

TITIK-TEMU

JURNAL DIALOG PERADABAN

Volume 5, Nomor 2, Januari - Juni 2013

Diterbitkan oleh Nurcholish Madjid Society (NCMS)

Sekretariat: Nurcholish Madjid Society

Graha STR, Lt. 4, Jl. Ampera Raya No. 11, Kemang
Jakarta Selatan 12550

E-mail: titik.temu@yahoo.com

Pemimpin Redaksi

Kautsar Azhari Noer

Wakil Pemimpin Redaksi

Muhamad Wahyuni Nafis

Sekretaris Redaksi

Fachrurozi • Rahmat Hidayatullah

Redaktur Pelaksana

Sunaryo

Dewan Redaksi

Budhy Munawar-Rachman • Fachrurozi • Kautsar Azhari Noer •
Moh. Monib • Muhamad Wahyuni Nafis • Rahmat Hidayatullah •
Sunaryo • Yudi Latif • Zainun Kamal

Pewajah Sampul

Taqi Kanara

Pewajah Isi

Moh. Syu'bi

Titik-Temu terbit setiap enam bulan. Redaksi menerima tulisan ilmiah dari kalangan manapun dan berhak menyunting, memperbaiki dan menyempurnakan naskah tulisan yang diterima. Naskah tulisan berkisar antara 15-25 halaman ukuran A-4 dengan ketikan spasi ganda dan dikirim via e-mail.

TITIK-TEMU, Vol. 5, No. 2, Januari - Juni 2013

ISSN 1979-5394

TITIK-TEMU

JURNAL DIALOG PERADABAN

Volume 5, Nomor 2, Januari - Juni 2013

DAFTAR ISI

Pedoman Transliterasi	1
Daftar Surat al-Qur'an	3-4
Bila Tuhan Mencintai Hamba-Nya	5
Pengantar	7-9

SAJIAN KHUSUS

Kebebasan, Kepartaian, dan Demokrasi <i>Nurcholish Madjid</i>	13-21
Nurcholish Madjid, Islam, dan Konsolidasi Demokrasi <i>Djayadi Hanan</i>	23-40
Jangan Berhenti pada Simbol, Tetapi Harus Menggapai Substansi <i>Muhamad Wahyuni Nafis</i>	41-46

ARTIKEL

<i>The State of Our Democracy:</i> Menata Ulang Gagasan dan Praktik Demokrasi di Indonesia <i>Bahtiar Effendy</i>	49-95
Antara Rasionalitas Sekuler dan Artikulasi Keagamaan: Peranan Agama dalam Ruang Publik menurut Jürgen Habermas <i>Arif Susanto</i>	97-111

DAFTAR ISI

Isa al-Masih menurut Islam <i>Waryono Abdul Ghafur</i>	113-150
Belajar Menjadi Manusia <i>Kautsar Azhari Noer</i>	151-164
RESENSI BUKU	
Islam Agama Cinta dan Kebahagiaan <i>Pipin Suhendar</i>	167-172
Membela <i>Wahdat al-Wujūd</i> <i>Abdul Muaz</i>	173-177
MAKLUMAT	
Susunan Pengurus Nurcholish Madjid Society	181-182
Ucapan Terima Kasih	183
Pembetulan	184
Berlangganan <i>Titik-Temu</i>	185

JANGAN BERHENTI PADA SIMBOL, TETAPI HARUS MENGGAPAI SUBSTANSI

Muhamad Wahyuni Nafis

Inti tulisan Nurcholish Madjid ini, yang berjudul “Kebebasan, Kepartaian, dan Demokrasi,” adalah tentang pentingnya substansi di balik formalitas, dalam hal ini formalitas kepartaian yang tumbuh begitu pesat di era reformasi. Dimulai dari tiga kebebasan asasi: kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berkumpul dan kebebasan berserikat; lalu tiga hak kemanusiaan yang paling suci yang ditegaskan dalam Pidato Perpisahan Nabi *saw* (*Khuthbat al-Wadā’*): *al-dimā’* (hidup), *al-amwāl* (harta) dan *al-a’rād* (harkat dan martabat); dan terakhir dari dua wawasan asasi di atas, Cak Nur (panggilan akrab Nurcholish Madjid) menegaskan pentingnya wawasan negara kebangsaan modern (*modern nation state*) untuk memasuki era reformasi. Cak Nur dengan penuh semangat mengambil bagian penting dari sisi pemikiran agar umat Islam mengambil peran substansial untuk mengisi era reformasi dengan membangun wawasan negara kebangsaan modern. Wawasan *modern nation state* yang dimaksudkan Cak Nur adalah wawasan kenegaraan yang bertumpu pada sistem sosial-politik yang melindungi tiga pangkal hak asasi di atas (hidup, kepemilikan harta dan kehormatan), dan yang mendorong dengan kuat tumbuhnya partisipasi umum dari masyarakat dalam kehidupan kenegaraan dan terbukanya penilaian bebas terhadap kinerja pimpinan kenegaraan dari semua lapisan.

Substansi Politik

Melihat euforia dan antusiasme politik pasca runtuhnya Orde Baru yang mengekang berbagai kebebasan, Cak Nur terpanggil untuk berperan-serta memberikan arah dan orientasi bagi kemunculan dan eksistensi partai yang bertumbuhan bagaikan jamur di musim hujan di era reformasi. Pertama, Cak Nur mengusulkan agar segera — saat itu — dibuat suatu peraturan yang legal-formal bagi partai politik untuk memenuhinya, terutama dari segi dukungan rakyat, sehingga jika tidak terpenuhi, partai tersebut diwajibkan bergabung dengan partai politik lain yang memenuhi syarat. Pemikiran ini telah terealisasi dalam undang-undang perpolitikan kita melalui apa yang disebut *electoral threshold*, yaitu jumlah minimal dukungan pemilih yang diperoleh oleh partai politik saat Pemilu.

Kedua, Cak Nur juga mengusulkan agar logo atau perlambang aspirasi politik yang mewujudkan nyata dalam ide kepartaian langsung dikaitkan dengan suatu nilai masyarakat madani, seperti asas keadilan, persamaan manusia, keterbukaan dan transparansi, keadaban (*civility*), dan partisipasi universal. Dan, lagi-lagi Cak Nur tidak berhenti pada simbol-simbol fisik (*mahabbah, eros*) dan cinta kearifan kemanusiaan (*mawaddah, philos*) saja, melainkan harus sambung pada semangat cinta kasih ilahi (*rahmah, agape*).

Upaya untuk terus mendewasakan masyarakat agar berorientasi pada hal-hal yang bersifat esensial (maknawi) diharapkan terus diperjuangkan agar bisa mengganti orientasi masyarakat dari yang bersifat *ramzī* (simbolik) sehingga dapat disadari dengan tepat perbedaan penting antara mana yang intrinsik dan mana yang instrumental dalam proses-proses dan struktur-struktur politik yang ada. Untuk memperjelas apa yang dikatakannya, Cak Nur mengutip tafsir Baidlawi berkaitan dengan tauhid bahwa tauhid pun dalam tingkatnya yang lebih tinggi harus mampu beranjak meninggalkan “tauhid nama” ke “tauhid esensi” (Hal itu dikatakan oleh Baidlawi ketika menafsirkan Q 17: 110).

Bagi Cak Nur, orientasi esensi, bukannya simbol, akan lebih mudah membuka wawasan luas untuk dapat bekerjasama dan saling

mendukung antar para anggota masyarakat, tanpa pertimbangan-pertimbangan komunalistik (atau yang sekarang sering disebut “SARA”). Orientasi esensi juga lebih mudah membebaskan anggota masyarakat dari absolutisme yang biasanya terkait dengan simbolisme.

Menutup uraiannya, Cak Nur menegaskan: “Dengan begitu suatu kemestian dalam demokrasi, yaitu *partial functioning of ideals* akan terwujud. Demokrasi melibatkan kesediaan yang tulus melakukan kompromi dan pencarian pertemuan kebaikan (*ishlāh*), yang pasti tidak akan terlaksana dalam suatu masyarakat yang diliputi pandangan serba absolutistik.”

Dalam pandangan saya, apa yang diuraikan Cak Nur seperti yang saya simpulkan di atas, adalah substansi politik yang mestinya dianut dan dilaksanakan oleh setiap penggagas dan pendiri serta pelaksana partai politik. Inilah isi, arah serta orientasi partai politik, dari mulai menjunjung tinggi hak asasi manusia, melalui perwujudan *modern nation state* yang dilaksanakan secara demokratis, yang tidak hanya berhenti pada cinta fisik (*mahabbah*) dan cinta kearifan kemanusiaan (*mawaddah*) saja, melainkan harus sampai pada cinta ilahi (*rahmah*). Artinya berpolitik di sini pada tingkatnya yang paling tinggi haruslah merupakan personifikasi dari pelaksanaan ketundukan dan cinta kepada Tuhan yang Maha Mutlak.

Pendidikan Politik Berorientasi Substansi

Sebagian pemikiran Cak Nur yang ditulis di waktu yang sangat dini di era reformasi itu, memang mengilhami sedikit politikus yang aktif di partai politik. Yang terlihat cukup pas dengan ide Cak Nur ini adalah Partai Keadilan (PK), yang kemudian berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai ini, dalam pandangan saya, adalah telah mengambil ide yang dipaparkan oleh Cak Nur — meski bisa saja para penggagas dan pendiri partai ini sebenarnya tidak/belum membaca artikel Cak Nur ini. Namun sangat disayangkan, yang berhasil diambil oleh para aktivis PKS adalah formalitasnya, tidak menyangkut

substansinya. Alih-alih partai ini harusnya bersifat universal untuk kepentingan bangsa Indonesia secara keseluruhan, malah ia terjatuh hanya untuk kepentingan kelompok Islam saja, itu pun Islam tertentu. Jadi, sangat sektarianistik. Belum lagi soal-soal perjuangan yang dijalankannya, baik cara-cara merekrut anggotanya maupun cara memperoleh dana untuk memenuhi kebutuhan perjuangannya, nampaknya masih sangat jauh dari yang diharapkan.

Melihat sepak-terjang yang dimunculkan, dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, nampaknya lebih cocok PK, terutama setelah namanya berubah menjadi PKS, sebagai partai yang mempolitikkan substansi politik untuk kepentingan politik sesaatnya.

Di sini memang diperlukan pembacaan kritis atas berbagai pemikiran Cak Nur yang berkaitan dengan teori dan moral politik di negara kita. Pemikiran sosial-keagamaan Cak Nur terlihat cukup berhasil pada masyarakat umumnya. Banyak masyarakat setelah tiga-empat dasawarsa sejak dicetuskannya ide-ide Cak Nur, mulai dari perlunya sekularisasi secara sosiologis, kebebasan berpikir, hingga *idea of progress* dan sikap keterbukaan, yang di dalamnya terkandung pernyataan penuh sihir “Islam, Yes; Partai Islam, No,” “Tidak Ada Negara Islam,” dan lain-lain, mulai menerimanya dengan penuh kesadaran. Tetapi berbeda dengan masyarakat politik, nampaknya ide-ide Cak Nur berkaitan dengan teori dan moral politik ini belum berhasil menembus para aktivis politik.

Untuk membuktikan pernyataan ini saya akan merujuk pada aktivitas Cak Nur sendiri saat dirinya menjelang Pemilu presiden tahun 2004 mendeklarasikan diri sebagai orang yang bersedia dicalonkan menjadi calon presiden. Saat itu banyak orang, mulai dari mahasiswa, wartawan, dosen, politisi, hingga pengusaha, memperbincangkan kesediaan Cak Nur menjadi calon presiden. Berbagai artikel pun pada saat itu muncul berhamburan di berbagai media ibukota. Sebagiannya senang, menyambut pencalonan Cak Nur dengan penuh optimisme. Sebagian yang lain sinis, bahkan mencela Cak Nur sebagai cendekiawan yang sudah kelelahan dan tidak tahan berhadapan dengan *bujuk-rayu* kekuasaan yang sangat menjanjikan hidup penuh “kebesaran” itu.

Saya memiliki catatan khusus berkenaan dengan deklarasi Cak Nur itu. Deklarasi tersebut merupakan gagasan pembaruan di bidang politik. Hal itu terlihat dalam beberapa alasan berikut ini. Pertama, Cak Nur tidak mempunyai partai politik, juga bukan aktivis dan anggota partai politik. Dalam bahasa Prof. Karl Mannheim, apa yang dilakukan Cak Nur adalah *utopia*. Karena berada di luar *mainstream* fakta politik di Tanah Air. Karena itu, bersediannya Cak Nur dicalonkan menjadi calon presiden itu, seperti saya tegaskan dia atas, merupakan tindakan pembaruan pemikiran di bidang politik — yang derajatnya sama dengan gagasannya tentang ”Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat” yang dipresentasikan pada 2 Januari 1970. Jadi kesediaannya dicalonkan menjadi calon presiden yang tanpa parpol tapi disertai *platform* yang jelas itu, memiliki derajat yang juga sama dengan gagasannya tentang ”Islam, yes; Partai Islam, No” dan perlunya ”sekularisasi” dalam beragama. Dan sebagaimana gagasannya pada tahun 1970 yang mengundang reaksi sangat keras dari banyak masyarakat, maka gagasan kesediaan Cak Nur untuk dicalonkan menjadi calon presiden di luar parpol itu pun ditentang oleh semua partai politik yang ada. Jangankan Cak Nur yang berada di luar parpol, para pengurus dan anggota parpol saja belum tentu bisa didaftarkan menjadi calon presiden. Partai Golkar yang disebut-sebut waktu itu akan mencalonkan Cak Nur menjadi presiden, justru dalam Rapimnas-nya melahirkan konsep konvensi. Konsep seleksi yang berupa konvensi itu memang sangat positif hingga Cak Nur terundang untuk mengikuti ”*beauty contest*” tersebut. Tapi apa yang terjadi ketika Cak Nur memulai turun ke daerah-daerah, yang ditanya adalah ”gizi,” bukan konsep yang dimiliki Cak Nur. Menyaksikan realitas politik semacam itu, jelas bertolak-belakang dengan gagasan moral politik yang akan dijalani Cak Nur. Karena itu, Cak Nur pun akhirnya mengundurkan diri.

Kedua, memerhatikan pernyataannya yang terus-menerus diulang waktu itu bahwa ”soal kesediaan dirinya dicalonkan sebagai calon presiden hanyalah wacana lunak,” dan yang paling penting sepuluh *platform* yang ditegaskannya, maka berbagai pelajaran

bermunculan berkenaan dengan situasi politik di Tanah Air. Karena itu, bagi penulis, sedikitnya deklarasi itu memberikan tiga pelajaran penting bagi iklim perpolitikan di negeri ini. *Pertama*, jika seseorang menghendaki menjadi presiden, maka berterusteranglah secara terbuka. Jangan sembunyi-sembunyi. *Kedua*, dalam kesediaannya menjadi calon presiden, seseorang harus melengkapinya dengan semacam "syahadat sosial" yang menjadi *mission statement* sehingga jika orang itu terpilih menjadi presiden rakyat bisa menagihnya. Itulah sepuluh *platform* yang ditegaskan Cak Nur sebagai contohnya. *Ketiga*, melalui deklarasi kesediaan dicalonkan menjadi calon presiden itu sebenarnya Cak Nur sedang melakukan suatu kritik pada undang-undang politik yang ada, yang mestinya memberi peluang bagi calon independen untuk bisa mencalonkan, atau dicalonkan, menjadi calon presiden.

Cak Nur akhirnya mengurungkan diri dari bursa pencalonan presiden. Dan jika disimpulkan dari apa yang saya jelaskan di atas, Cak Nur tidak lanjut mencalonkan diri menjadi presiden adalah karena ranah politik praktis tidak mengenal moral politik. Yang berjalan dan menentukan arah politik praktis adalah kekuatan modal, bukan ideal kemaslahatan yang dijalankan berdasarkan moral politik yang selama ini didengungkan oleh Cak Nur. Inilah nampaknya *critical point* dari gagasan sosial-politik Cak Nur yang masih sangat memerlukan kekuatan komitmen untuk terus dikaji, dikembangkan, disosialisasikan serta dikritik secara kreatif agar mendapatkan jejaknya di ranah politik praktis.

Wa'llāh a'lam bi al-shawāb. ❖

Muhamad Wahyuni Nafis adalah Principal Sekolah Madania, Ketua Nurcholish Madjid Society (NCMS), dan Advisory Board Pesantren Daar el-Qolam Banten.